1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Perkembangan inflasi Kabupaten Timor Tengah Selatan pada periode April sampai dengan Juni 2026 menunjukkan kondisi yang fluktuatif namun masih relatif terkendali. Inflasi year-on-year (y-on-y) pada April 2026 tercatat sebesar 2,11 persen, kemudian mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 0,95 persen pada Mei 2026, dan kembali meningkat menjadi 2,80 persen pada Juni 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga di Kabupaten Timor Tengah Selatan sempat mereda pada Mei, namun kembali meningkat pada Juni.

   Pada April 2026, inflasi y-on-y sebesar 2,11 persen dengan inflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,97 persen dan inflasi year-to-date (y-to-d) sebesar 2,81 persen. Kenaikan harga terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,72 persen, pakaian dan alas kaki sebesar 6,59 persen, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,37 persen, transportasi sebesar 0,76 persen, pendidikan sebesar 2,26 persen, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,16 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada April tekanan harga masih berasal dari komoditas pangan maupun beberapa barang dan jasa nonpangan.

   Pada Mei 2026, inflasi y-on-y Kabupaten Timor Tengah Selatan turun menjadi 0,95 persen, yang merupakan inflasi terendah di antara wilayah cakupan IHK di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan tersebut. Penurunan ini menunjukkan bahwa tekanan harga secara tahunan relatif mereda. Namun demikian, beberapa kelompok pengeluaran masih mengalami kenaikan harga, antara lain makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,48 persen, transportasi sebesar 3,32 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,35 persen, kesehatan sebesar 1,80 persen, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,55 persen.

   Selanjutnya pada Juni 2026, inflasi Kabupaten Timor Tengah Selatan kembali meningkat menjadi 2,80 persen y-on-y dengan IHK sebesar 111,79. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kembali tekanan harga dibandingkan bulan sebelumnya. Pada periode yang sama, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi y-on-y sebesar 3,56 persen, sehingga inflasi TTS masih berada di bawah inflasi Provinsi NTT.

   Tekanan inflasi pada Juni terutama perlu mendapat perhatian pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, yang secara regional mengalami kenaikan indeks sebesar 4,17 persen, serta kelompok transportasi sebesar 3,87 persen, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,04 persen, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 14,84 persen. Kelompok pendidikan justru mengalami penurunan indeks sebesar 2,25 persen.

   Secara umum, perkembangan April–Juni 2026 menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan masih menjadi perhatian utama dalam pengendalian inflasi Kabupaten Timor Tengah Selatan. Fluktuasi harga pangan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan, kondisi produksi pertanian, cuaca, biaya transportasi dan distribusi, serta perubahan permintaan masyarakat. Selain pangan, perkembangan harga transportasi, bahan bakar rumah tangga, kesehatan, serta barang dan jasa lainnya juga perlu terus dipantau.

   Risiko inflasi ke depan antara lain potensi kenaikan harga bahan pangan akibat gangguan

produksi dan perubahan kondisi cuaca, keterbatasan pasokan komoditas tertentu, peningkatan biaya distribusi dan transportasi, serta meningkatnya permintaan masyarakat pada periode tertentu. Selain itu, kenaikan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta transportasi perlu menjadi perhatian karena dapat memberikan tekanan tambahan terhadap inflasi daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

    - **Fluktuasi harga yang cukup tinggi.** Inflasi year-on-year Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami perubahan dari 2,11 persen pada April 2026, turun menjadi 0,95 persen pada Mei, kemudian meningkat kembali menjadi 2,80 persen pada Juni 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga masih bersifat fluktuatif dan memerlukan pemantauan secara berkelanjutan.
    - **Tekanan pada kelompok makanan, minuman dan tembakau.** Kelompok ini masih menjadi salah satu perhatian utama dalam pengendalian inflasi. Pada Mei 2026 kelompok tersebut mengalami inflasi sebesar 2,48 persen dan meningkat menjadi 4,17 persen pada Juni 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan masih menjadi tantangan dalam menjaga daya beli masyarakat.
    - **Ketersediaan dan kesinambungan pasokan pangan.** Perubahan harga komoditas pangan dapat dipengaruhi oleh kondisi produksi, musim, cuaca dan ketersediaan pasokan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan ketersediaan bahan pangan, terutama komoditas yang memiliki risiko mengalami kenaikan harga.
    - **Permasalahan distribusi dan biaya transportasi.** Kondisi geografis Kabupaten Timor Tengah Selatan dan jarak antarwilayah dapat memengaruhi kelancaran distribusi barang serta biaya angkutan. Hal ini perlu mendapat perhatian karena kelompok transportasi mengalami kenaikan, yaitu sebesar 3,32 persen pada Mei dan 3,87 persen pada Juni 2026.
    - **Kenaikan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.** Kelompok ini menunjukkan tekanan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 15,55 persen pada Mei dan 14,84 persen pada Juni 2026. Meskipun tidak seluruh kenaikan tersebut berasal dari kebutuhan pokok, perkembangan kelompok ini tetap perlu dipantau karena dapat memberikan tekanan terhadap biaya konsumsi masyarakat.
    - **Keterbatasan pemantauan harga dan pasokan secara cepat pada seluruh wilayah.** Perbedaan kondisi pasar antar kecamatan dan adanya pasar mingguan menyebabkan perkembangan harga perlu dipantau secara rutin agar pemerintah daerah dapat mengetahui lebih awal komoditas yang mengalami kenaikan dan mengambil langkah antisipasi.
    - **Potensi meningkatnya tekanan inflasi pada periode berikutnya.** Kenaikan inflasi pada Juni menjadi 2,80 persen menunjukkan perlunya kewaspadaan terhadap kemungkinan berlanjutnya tekanan harga, terutama dari kelompok pangan, transportasi dan komoditas lainnya. Sebagai pembanding, inflasi TTS pada Juni masih lebih rendah dibandingkan inflasi Provinsi NTT sebesar 3,56 persen.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    - Melaksanakan monitoring perkembangan harga bahan pokok dan barang kebutuhan penting secara berkala pada pasar-pasar di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga, ketersediaan barang

serta mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga.
    - Melakukan pemantauan harga pada pasar mingguan di beberapa kecamatan sebagai upaya memperoleh informasi kondisi harga secara langsung di lapangan dan mengetahui adanya perbedaan harga antarwilayah.
    - Melakukan koordinasi melalui TPID bersama OPD teknis dan stakeholder terkait dalam membahas perkembangan inflasi, harga komoditas pangan, ketersediaan pasokan serta permasalahan distribusi yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi daerah.
    - Menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan, terutama komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga akibat faktor musim, kondisi produksi dan perubahan permintaan masyarakat.
    - Melakukan pemantauan terhadap kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, khususnya untuk memastikan pasokan tetap tersedia pada wilayah yang memiliki jarak dan akses distribusi yang relatif jauh dari pusat perdagangan.
    - Meningkatkan pemanfaatan data perkembangan harga dan inflasi sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam menentukan langkah pengendalian inflasi. Data hasil monitoring pasar menjadi bahan koordinasi dalam mengidentifikasi komoditas yang perlu mendapat perhatian.
    - Melakukan koordinasi dan pemantauan menjelang dan selama periode meningkatnya permintaan masyarakat, khususnya pada momentum hari besar keagamaan, untuk mengantisipasi peningkatan harga dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok.
    - Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antarstakeholder dalam menyampaikan informasi mengenai perkembangan harga, ketersediaan pasokan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di daerah.
    -

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan pelaksanaan pengendalian inflasi selama April sampai dengan Juni 2026, kebijakan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan secara umum telah memberikan hasil yang cukup baik dalam menjaga stabilitas harga. Hal ini tercermin dari inflasi Kabupaten Timor Tengah Selatan yang masih berada pada tingkat yang terkendali, meskipun mengalami fluktuasi selama periode tersebut, yaitu 2,11 persen pada April, 0,95 persen pada Mei, dan meningkat menjadi 2,80 persen pada Juni 2026.

Dari sisi keterjangkauan harga, kegiatan pemantauan harga di pasar telah membantu pemerintah daerah memperoleh gambaran mengenai perkembangan harga bahan kebutuhan pokok. Namun, masih diperlukan peningkatan kemampuan untuk mendeteksi lebih awal komoditas yang mengalami kenaikan sehingga langkah penanganan dapat dilakukan sebelum kenaikan harga menjadi lebih besar.

Dari sisi ketersediaan pasokan, kondisi pasokan secara umum masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah serta faktor musim dan kondisi cuaca masih menjadi risiko yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi harga, khususnya pada komoditas pangan.

Dari sisi distribusi, kelancaran pasokan ke pasar-pasar di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan masih perlu mendapat perhatian. Kondisi geografis dan jarak antarwilayah dapat menyebabkan perbedaan harga serta meningkatkan biaya transportasi. Hal ini menjadi salah

satu faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga stabilitas harga.

Dari sisi koordinasi pengendalian inflasi, sinergi antara TPID, OPD teknis, BPS, pelaku usaha dan stakeholder terkait perlu terus diperkuat. Koordinasi tidak hanya dilakukan ketika terjadi kenaikan harga, tetapi perlu diarahkan pada upaya pencegahan dan deteksi dini berdasarkan perkembangan data harga dan kondisi pasokan.

Dari sisi hasil akhir, penurunan inflasi pada Mei menjadi 0,95 persen menunjukkan adanya periode ketika tekanan harga dapat ditekan dengan baik. Namun, peningkatan kembali menjadi 2,80 persen pada Juni menunjukkan bahwa stabilitas harga masih menghadapi risiko dan belum sepenuhnya konsisten. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian inflasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat responsif terhadap kenaikan harga.

Dengan demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian inflasi Kabupaten Timor Tengah Selatan pada April–Juni 2026 cukup efektif dalam menjaga inflasi tetap terkendali, tetapi masih perlu ditingkatkan pada aspek deteksi dini, pengamanan pasokan pangan, pengendalian biaya distribusi, serta kecepatan respons terhadap perubahan harga. Ke depan, hasil monitoring harga perlu lebih optimal digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan intervensi pengendalian inflasi daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    - Memperkuat sistem deteksi dini kenaikan harga, dengan menetapkan komoditas yang mengalami kenaikan harga secara berulang sebagai komoditas prioritas untuk dipantau dan segera ditindaklanjuti oleh TPID dan OPD terkait.
    - Menyusun pemetaan komoditas pangan yang rawan mengalami kekurangan pasokan, berdasarkan musim produksi, kondisi cuaca dan pola konsumsi masyarakat, sehingga pemerintah daerah dapat mempersiapkan langkah pengamanan pasokan sebelum terjadi kenaikan harga.
    - Mendorong peningkatan produksi dan pemanfaatan pangan lokal, khususnya komoditas yang dapat diproduksi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
    - Meningkatkan efektivitas koordinasi TPID berbasis data, dengan menjadikan hasil monitoring harga, data inflasi dan informasi kondisi pasokan sebagai dasar dalam menentukan komoditas yang membutuhkan penanganan segera.
    - Melakukan evaluasi berkala terhadap komoditas penyumbang inflasi, sehingga kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada tingkat inflasi secara umum, tetapi juga pada sumber tekanan harga yang secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat.